

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Manajemen dalam menjalankan perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran pemilik. Akan tetapi, manajemen seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham selaku pemilik perusahaan.

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas.

Menurut Fama dan Jensen (1983), masalah keagenan di perusahaan publik muncul karena sifat terbatas dari klaim residual saham biasa, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam kepentingan manajer profesional dengan kepentingan para pemegang saham korporasi. Jika perbedaan tersebut dibiarkan berkembang dan bertahan dalam perusahaan publik, maka manajer akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekayaan

commit to user

pemegang saham untuk diri mereka sendiri (Jensen dan Meckling, 1976; Fama dan Jensen, 1983).

Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa ada kemungkinan bagi manajer untuk menyembunyikan *rent extraction* melalui tindakan pajak agresif apabila antara *rent extraction* dan tindakan pajak agresif tidak menimbulkan biaya. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan pajak agresif dalam pandangan kontemporer mempunyai dua tujuan. Tidak hanya untuk menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tapi juga untuk menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Bahkan, potensi *rent extraction* yang menyertai agresivitas pajak, meskipun bermanfaat bagi manajer, dapat menimbulkan biaya agensi yang signifikan bagi pemegang saham, yang pada gilirannya memaksakan diskon pada harga saham perusahaan. Jadi, perusahaan dengan tata kelola yang buruk, tindakan pajaknya menjadi kurang agresif jika manajer menawarkan insentif yang menyelaraskan kepentingan mereka dengan orang-orang dari pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

Menurut Desai dan Dharmapala (2009), terdapat dua tindakan pajak agresif yaitu tradisional dan kontemporer. Pandangan tradisional mengartikan tindakan pajak agresif sebagai bentuk pengamanan kekayaan

dimana tindakan pajak agresif dilakukan semata-mata ditujukan untuk mengurangi beban pajak. Dalam pandangan kontemporer tindakan pajak agresif didefinisikan sebagai bentuk *rent extraction*.

Desai dan Dharmapala (2006) menyebutkan bahwa pemegang saham mungkin tidak setuju apabila manajer terlibat dalam tindakan pajak agresif, meskipun menimbulkan keuntungan potensial setelah pajak, karena dengan berbuat demikian manajer dapat menghasilkan *rent extraction* tambahan. Beberapa penelitian telah berusaha untuk menguji hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2006). Hanlon dan Slemrod (2009) menganalisis reaksi harga saham terhadap berita tentang tindakan pajak agresif dan menemukan bahwa, rata-rata, harga saham perusahaan menurun ketika ada berita tentang keterlibatannya dalam kegiatan pajak agresif.

Chen et al. (2010) meneliti apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya dibandingkan perusahaan non-keluarga. Mereka menemukan bahwa perusahaan milik keluarga yang pajak kurang agresif sebagai pemilik keluarga bersedia untuk melupakan manfaat pajak untuk menghindari biaya non-pajak dari potensi harga diskon untuk harga saham korporasi yang dapat terjadi dari kekhawatiran pemegang saham tentang *rent extraction* manajerial. Hasil ini cukup konsisten dengan Desai dan Dharmapala (2006), tetapi mereka tidak menemukan dampak tata kelola perusahaan pada agresivitas pajak.

Secara khusus, teori keagenan berfokus pada hubungan antara manajer dan pemegang saham, sementara tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam masyarakat seperti badan pemerintah (misalnya, otoritas pajak), kelompok politik, serikat buruh, masyarakat, karyawan, dan pelanggan.

2. Teori Legitimasi

Suchman (1995) menjelaskan bahwa legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan entitas yang diinginkan sudah tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem sosial dibangun norma, nilai-nilai, keyakinan, dan definisi. Legitimasi adalah umum dalam hal ini merupakan evaluasi perlindungan itu sampai batas tertentu, melampaui tindakan yang merugikan tertentu atau kejadian; dengan demikian, legitimasi adalah penyesuaian terhadap peristiwa tertentu. Legitimasi adalah persepsi atau asumsi yang menggambarkan reaksi dari pengamat organisasi karena mereka melihatnya; dengan demikian, legitimasi yang dimiliki secara objektif, namun dibuat secara subyektif. Sebuah organisasi dapat berbeda secara dramatis dari norma social. Legitimasi dibangun secara sosial dalam hal itu mencerminkan keselarasan antara perilaku dari entitas yang sah dan bersama (atau diduga bersama) keyakinan dari beberapa

kelompok sosial; dengan demikian, legitimasi tergantung pada kolektifitas.

Organisasi mencari legitimasi karena berbagai alasan, dan kesimpulan tentang pentingnya legitimasi. Kesulitan dan efektivitas upaya legitimasi tergantung pada tujuan terhadap upaya. Dua dimensi sangat penting dalam hal ini adalah perbedaan antara mengejar keberlangsungan dengan mengejar kredibilitas dan perbedaan antara mencari dukungan pasif dengan aktif mencari dukungan.

Pada saat yang sama, legitimasi tidak hanya mempengaruhi bagaimana orang bertindak terhadap organisasi, tetapi juga bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri. Dengan demikian, organisasi yang sah tidak hanya layak, tetapi juga lebih bermakna, lebih dapat diprediksi, dan lebih dapat dipercaya.

3. Manajemen Laba

Scott (2012:423) menyatakan bahwa manajemen laba adalah pilihan atas kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua cara pemahaman atas manajemen laba. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistis manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political costs (*opportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient commit to user*

contracting (Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Dengan semua insentif untuk melakukan manajemen laba, maka bukanlah suatu yang mengherankan apabila sering kali para manajer menggunakan fleksibilitas yang terkandung di dalam akuntansi akrual agar benar-benar mampu mengatur labanya. Semakin banyak orang yang mendapatkan pengetahuan atau pelatihan akuntansi, semakin mudah bagi orang tersebut untuk melihat estimasi atau pertimbangan akuntansi yang dapat digunakan untuk menaikkan laba yang dilaporkan.

Pola manajemen laba sebagaimana dikemukakan oleh Scott (2012:425), yaitu:

- a. *taking a bath*: Hal ini dapat terjadi selama periode reorganisasi, termasuk pengangkatan *Chief Executive Officer (CEO)* baru. Jika perusahaan memang sedang dalam kondisi rugi, maka manajemen akan membebankan biaya-biaya yang seharusnya ditangguhkan atau dapat ditangguhkan agar tidak mengganggu laba di masa mendatang.

- b. *income minimazation*: Skenario ini mirip taking a bath tetapi lebih halus. Skenario ini sengaja memilih alternatif akuntansi atau manipulasi yang akan menghasilkan laba lebih rendah, misalnya metode akuntansi persediaan dipilih *Last In First Out* (LIFO), metode penyusutan dipilih *double declining* atau *sum of the years digit*, membebankan biaya fiktif.
- c. *income maximization*: Untuk mendapatkan bonus yang lebih besar atau menghindari pelanggaran *debt covenants* perusahaan melakukan skenario yang dapat memperbesar laba. Kebalikan dari *Income minimization* maka skenario ini memilih metode atau melakukan manipulasi yang dapat memperbesar laba, misalnya memilih *First In First Out* (FIFO), mengakui pendapatan lebih cepat daripada seharusnya.
- d. *income smoothing*: Tidak seperti skenario di atas, pada skenario ini perusahaan justru berusaha agar laba yang dicapai dari tahun ke tahun berada pada level yang stabil.

Beberapa hal yang memotivasi terjadinya manajemen laba adalah sebagai berikut :

1. Motivasi Program Bonus

Jika pada suatu tahun tertentu laba bersih perusahaan rendah maka tindakan manajer adalah menurunkan pendapatan, sehingga laba

perusahaan akan menjadi lebih rendah (*taking a bath*) yang bermaksud untuk mencapai bonus pada tahun berikutnya. Sedangkan jika pada satu tahun tertentu laba bersih perusahaan tinggi maka tindakan yang dilakukan manajer adalah menurunkan pendapatan, sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih rendah. Tindakan ini dilakukan karena manajer tidak akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan.

2. Motivasi Politik (Political Motivations)

Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam industri strategis seperti minyak dan gas akan sangat mudah untuk diawasi. Perusahaan seperti ini cenderung untuk mengelola labanya. Pada periode kemakmuran, perusahaan menggunakan prosedur dan praktik-praktik akuntansi yang meminimalkan laba bersih perusahaan. Sebaliknya, publik akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan peraturan untuk menurunkan profitabilitas mereka.

3. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations)

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri

untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Di Indonesia, kerugian atas aktivitas operasi perusahaan diberikan kompensasi untuk diperhitungkan sebagai pengurangan pajak di masa depan, sehingga hal ini akan mengurangi pembayaran pajak bagi perusahaan ketika perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Dampak dari kompensasi rugi terhadap laba adalah restitusi pajak.

4. Motivasi Perubahan Chief Executif Officer (Changes of CEO Motivations)

Manajemen laba juga terjadi disekitar waktu pergantian CEO. Hipotesis program bonus memprediksi bahwa ketika waktu mendekati pengunduran diri CEO maka tindakan yang dilakukan adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Sedangkan CEO yang kinerjanya buruk akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan laba mereka dengan tujuan mencegah atau menunda pemberhentian mereka. Motivasi melakukan manajemen laba juga dapat dilakukan oleh CEO baru, terutama jika cost dibebankan pada tahun transisi, melalui penghapusan operasi yang tidak diinginkan atau divisi yang tidak menguntungkan.

5. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka. Nampaknya informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan dalam prospektus bermanfaat sebagai sumber informasi. Terdapat kemungkinan bahwa manajer perusahaan *go public* akan mengelola prospektusnya dengan harapan dapat menaikkan harga saham.

6. Motivasi Perjanjian Utang (Debt Covenants Motivations)

Manajemen laba dengan tujuan untuk memenuhi perjanjian utang timbul dari kontrak utang jangka panjang. Perjanjian utang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan manajer. Pelanggaran terhadap perjanjian mengakibatkan biaya yang tinggi terhadap perusahaan, oleh karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian.

4. Tindakan Pajak Agresif

Pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham. Mengingat tujuan utama

memaksimalkan nilai pemegang saham, perusahaan memiliki insentif keuangan untuk mengadopsi strategi pajak yang memungkinkan mereka untuk meminimalkan pajak mereka. Namun, tindakan pajak agresif dapat berdampak buruk reputasi perusahaan, aset yang tak ternilai. Perencanaan pajak agresif tidak selalu memaksimalkan nilai perusahaan, karena dapat mengakibatkan pengeluaran besar (setelah pemeriksaan pajak), dan itu dapat merusak reputasi perusahaan.

Chen et al (2010) mendefinisikan tindakan pajak agresif sebagai penggunaan perencanaan pajak untuk membuat penghasilan kena pajak menjadi rendah. Sedangkan Frank et al (2009) menjelaskan bahwa tindakan pajak agresif merupakan suatu perencanaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik memakai cara yang termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau tidak (*tax evasion*) Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan caracara yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Desai dan Dharmapala, (2006) terdapat beberapa keuntungan dan kerugian tindakan pajak agresif. Keuntungan tindakan pajak agresif diantaranya:

1. Penghematan pajak, akibatnya bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer tersebut.

3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik.

Meskipun tindakan pajak agresif memiliki beberapa keuntungan, namun adapula kerugian dari tindakan pajak agresif perusahaan. Salah satu kerugiannya adalah adanya hukuman yang memberatkan apabila perusahaan terbukti melakukan tindakan pajak agresif yang merugikan negara.

Ketika menentukan agresivitas pajak, pengambil keputusan melakukan *trade off* manfaat dan biaya. Manfaat yang paling jelas dari agresivitas pajak yaitu berupa penghematan pajak yang lebih besar. Sementara hal tersebut terhutang kepada pemegang saham, manajer juga mendapatkan keuntungan melalui kompensasi mereka langsung atau tidak langsung, oleh pemegang saham atas upaya mereka dalam manajemen pajak.

Ada beberapa metode untuk mengukur tindakan pajak agresif diantaranya adalah *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Different (BTD)*, *Marginal Tax Rate*, and *Tax Shelter Activity* (Hanlon dan Heitzman, 2010). ETR memberikan ringkasan statistik yang tepat tentang efek kumulatif dari perubahan insentif pajak dan tarif pajak perusahaan. ETR menyediakan ringkasan statistik dasar yang menggambarkan kinerja pajak oleh jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan relatif terhadap laba kotor. Langkah ini mencerminkan perencanaan pajak agresif melalui

perbedaan buku-pajak permanen. Contoh perencanaan pajak tersebut adalah investasidi negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Chen, 2010).

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini akan disebutkan dalam lampiran 1. Namun untuk membentuk hipotesis penelitian, berikut ini adalah pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan juga pengembangan hipotesis untuk masing-masing jenis kepemilikan perusahaan.

Kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak

Struktur bisnis keluarga memiliki konflik keagenan yang berbeda dengan mengacu terhadap biaya dan manfaat dari penghindaran pajak sehingga membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Penunjukan eksekutif di dewan bisnis keluarga sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga untuk keberlangsungan sebagai pengendali perusahaan (Peng & Jiang, 2010). Hal ini menunjukkan kesesuaian kepentingan pemilik perusahaan dan bahwa manajer hanya untuk disewa. Penghematan pajak dari menghindari pajak dan / atau *rent extraction* melalui manajer berfungsi sebagai manfaat dari penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan keluarga (Chen et al., 2010).

Namun, ada masalah keagenan antara mayoritas dan pemegang saham minoritas (Young et al., 2008). Hal ini menunjukkan kemungkinan penurunan harga saham oleh pemegang saham minoritas dimana hal ini merupakan biaya *commit to user*

atas penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan keluarga. Selain penurunan harga saham, potensi hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas pajak dan kerusakan legitimasi organisasi merupakan biaya lain penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan keluarga.

Namun, biaya yang terkait praktik penghindaran pajak lebih kecil dibanding manfaat bagi perusahaan keluarga di lingkungan kepemilikan yang terkonsentrasi. Potensi penurunan harga saham oleh pemegang saham minoritas mungkin tidak terlihat dalam lingkungan kepemilikan terkonsentrasi. Dengan demikian, satu-satunya kemungkinan biaya penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan keluarga dalam pengaturan tersebut adalah hukuman yang potensial yang akan dikenakan oleh otoritas pajak. Meskipun hal tersebut mungkin memiliki efek pada arus kas dari perusahaan keluarga, efek reputasi yang tampak kurang karena mereka mencari sedikit modal dari pasar karena kehadiran pemegang saham utama yang menyediakan dana yang diperlukan. Thillainathan (1999) menyebutkan bahwa ada kemungkinan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya untuk penghindaran pajak pada perusahaan dengan status konsentrasi kepemilikan keluarga di Malaysia.

Martinez dan Ramalho (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Brazil. Hasil penelitian Martinez dan Ramalho (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan keluarga

lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Chen et al (2010) yang menemukan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif terhadap tindakan perencanaan pajak. Hasil yang berbeda pula ditemukan oleh Hidayanti dan Laksito (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori agensi dan manajemen laba, bahwa berdasarkan motivasi perpajakan, manajer akan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak demi memperoleh insentif akibat pengurangan pajak sehingga manajer akan lebih agresif dalam melakukan tindak perencanaan pajak. Maka berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Kepemilikan pemerintah dan penghindaran pajak

Pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam perekonomian negara. Pemerintah memiliki otoritas atas industri yang terkait dengan kesejahteraan mayoritas. Pemerintah atau badan-badan mereka masih mempertahankan kontrol dari sejumlah besar perusahaan terutama di industri utama (Chan et al., 2013). Ada temuan yang berbeda dalam studi sebelumnya mengenai kepemilikan pemerintah terhadap agresivitas pajak.

Kehadiran kepemilikan pemerintah di perusahaan ditandai dari adanya perusahaan seperti *Government linked Companies* (GLCs) atau di Indonesia disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lau & Tong, 2008). Manfaat penghindaran pajak tampak lebih tinggi daripada biaya yang timbul atas penghindaran pajak untuk BUMN. Sementara manfaat dari arus kas meningkat melalui penghindaran pajak, satu-satunya biaya yang muncul atas penghindaran pajak untuk perusahaan-perusahaan ini adalah potensi *rent extraction* dengan manajer (Mohd Ghazali & Weetman, 2006). Sanksi potensial yang dikenakan oleh otoritas pajak berkurang karena koneksi politik mereka (Faccio et al., 2006).

Namun, cukup mengejutkan bahwa cukup sedikit penelitian yang menguji efek kepemilikan pemerintah dan penghindaran pajak di negara maju. Untuk negara berkembang, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan usaha tidak dapat dikesampingkan (Adhikari et al, 2006). Zeng (2010) mempelajari kepemilikan pemerintah dan agresivitas pajak di perusahaan China yang terdaftar selama periode 1998-2008 dan menemukan bahwa kepemilikan pemerintah kurang agresif dalam melakukan tindakan perencanaan pajak (atau menghindari agresivitas pajak). Penelitian lain dengan menggunakan semua perusahaan kecuali lembaga keuangan di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen antara tahun 2003 dan 2009 dilakukan oleh Chan et al. (2013) dan menemukan bahwa manajer perusahaan yang dikendalikan pemerintah memiliki tujuan politik untuk melindungi pendapatan pemerintah, dan mereka mendorong perusahaan mereka untuk menghindari mengejar perencanaan pajak agresif. Bukti mereka berarti

bahwa perusahaan yang dikendalikan pemerintah mengejar strategi pajak kurang agresif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non-dikendalikan-pemerintah. Sejak kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk koneksi politik, ditemukan Adhikari et al. (2006) bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan lebih agresif dalam perencanaan pajak. Wu et al. (2012) menyelidiki efek yang berbeda dari koneksi politik pada kinerja perusahaan dari perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta di Cina. Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan swasta dengan manajer terhubung secara politik memiliki ETR yang lebih rendah daripada mereka yang tidak manajer koneksi politik. Namun, apakah BUMN lokal dan BUMN pusat memiliki manajer yang terhubung secara politik atau tidak, tidak mempengaruhi ETR mereka.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas dan teori mengenai manajemen laba menyangkut motivasi politik untuk melakukan manajemen laba, serta perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung diselamatkan oleh pemerintah penelitian ini mengemukakan hipotesis bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah lebih agresif dalam melakukan upaya tindakan perencanaan pengurangan pajak perusahaan.

H₂ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan salah satu sarana penting dimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawab kewarganegaraan kepada masyarakat di mana ia beroperasi.

D'souza, Megginson & Nash (2001) menemukan bahwa kepemilikan asing saham berhubungan positif dengan profitabilitas yang tinggi dan efisiensi. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian dari Smith, Cin & Vodopivve (1997) yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif kepemilikan saham oleh asing terhadap profitabilitas dan efisiensi perusahaan, semakin besar porsi kepemilikan asing di perusahaan, semakin efisien dan *profitable* perusahaan tersebut. Namun, kehadiran investor asing telah dikaitkan dengan tindakan pajak agresif (Christensen & Murphy, 2004). Secara empiris, perusahaan multinasional US ditemukan membayar pajak rendah di negara-negara tuan rumah mereka meskipun tingkat profitabilitas tinggi.

Meskipun demikian, hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak hanya sering dipelajari di luar negara-negara maju dengan Demirguc-Kunt dan Huizinga (2001). Menggunakan data yang dihasilkan dari delapan puluh negara di seluruh dunia dan berfokus pada sektor perbankan, penulis menemukan bahwa bank-bank asing membayar pajak lebih rendah daripada rekan-rekan dalam negeri mereka di negara tuan rumah. Meskipun studi ini memberikan wawasan terhadap efek kepemilikan asing pada penghindaran pajak bertentangan

dengan pendapat umum bahwa investor asing selalu sesuai dengan ketentuan umum internasional.

Huizinga dan Nicodeme (2006) menyelidiki hubungan antara kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan badan di antara beberapa negara Eropa. Studi ini menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat yang lebih tinggi dari kepemilikan asing, memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling melengkapi antara kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan badan.

Demirguc-Kunt dan Huizinza (2001) menguji hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak antara beberapa bank di 80 negara di seluruh dunia. Dengan periode delapan tahun, analisis global menunjukkan bahwa bank-bank asing membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan bank-bank domestik di negara-negara asal. Hal ini juga menemukan bahwa bank-bank tersebut menggunakan strategi pergeseran laba untuk menghindari pembayaran pajak.

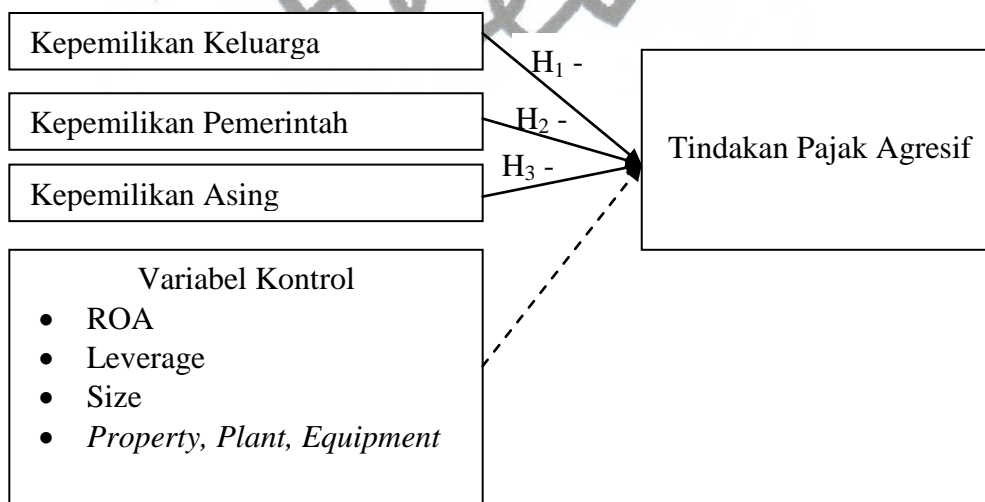
Salihu (2015) menemukan hubungan positif yang signifikan antara kepentingan investor asing dan langkah-langkah penghindaran pajak perusahaan antara perusahaan Malaysia yang besar. Hasil ini menunjukkan kemungkinan perusahaan multinasional memanfaatkan skala internasional operasi mereka untuk menghindari pajak di kedua negara domisili maupun di negara tempat induk perusahaan. Di Indonesia, Rusydi dan Martani (2014) tidak menemukan hubungan antara kepemilikan asing dan agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, yang mengemukakan bahwa terdapat perbedaan temuan mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap tindakan perpajakan, maka masih terdapat peluang untuk melakukan penelitian yang serupa. Dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salihu (2015) yang mengemukakan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan skala internasional operasi mereka untuk menghindari pajak, maka hipotesis yang dikemukakan adalah kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

H₃ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dalam penelitian ini.



Gambar 1

Kerangka Penelitian

commit to user